

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Laporan keuangan bisa menjadi salah satu aspek penting untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja dalam sebuah perusahaan yang mengacu pada informasi keuangan yang dikeluarkan. Menurut Jusup (2014),:

“Laporan keuangan adalah sebuah *output* yang dihasilkan perusahaan yang menampilkan bagaimana kondisi suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat berguna bagi keperluan pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan”.

Kemudian menurut Azwari, dkk. (2022), Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi laporan keuangan merupakan suatu output yang disusun oleh perusahaan untuk menunjukkan kondisi dan kinerja finansial pada suatu periode.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Menurut Mardiasmo (2018), laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan memberikan informasi kepada publik. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dan transparan mengenai posisi keuangan serta transaksi pemerintah selama periode tertentu, guna mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan publik.

2.2.2. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta dapat mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Informasi yang relevan bercirikan memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, dapat diverifikasi, dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai.

2.3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

2.3.1. Definisi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut PP RI No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018), Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip dan pedoman akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, guna memastikan informasi keuangan yang disampaikan bersifat andal, relevan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pengguna laporan keuangan.

2.3.2. Indikator Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan indikator:

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dibuat agar dapat dipahami pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi.

Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran

untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap.

Akuntansi Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya pemerolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau digunakan dengan maksud untuk digunakan.

8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lain yang proses pemerolehannya/pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut akan diperoleh.
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- c. Aktiva tersebut masih dalam proses pengerjaan.

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan, pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam Laporan Operasional adalah pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

2.4. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah

2.4.1. Definisi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Menurut Mahsun, dkk. (2013) sistem informasi akuntansi daerah adalah metode dan prosedur penyelenggaraan keuangan daerah yang ditetapkan di suatu pemerintahan daerah. Berdasarkan Pemendagri No. 64 Tahun 2013:

”Sistem Akuntansi Pemerintah daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan penerapan sistem akuntansi daerah merupakan suatu metode dan prosedur yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup serangkaian tahapan mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, hingga peringkasan transaksi dan kejadian keuangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.2. Indikator Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permandagri No. 64 Tahun 2013 sekurang-kurangnya mencakup:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini yaitu berbasis akrual.

Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya,

yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.

2. Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku

Transaksi-transaksi yang terjadi dalam dilakukan berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi. Pencatatan transaksi juga harus dilakukan secara kronologis.

3. Pembuatan Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodic guna kepentingan pengambilan keputusan.

2.5. Pengendalian Internal

2.5.1. Definisi Pengendalian Internal

Menurut Bastian (2007), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai. Menurut Mardiasmo (2018),:

“pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh pihak manajemen (seperti kepala daerah, dewan komisaris, atau personel terkait) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi.

2.5.2. Indikator Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) tentang Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka lima indikator dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari sistem pengendalian intern yang mencerminkan sikap pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya pengendalian dalam organisasi. Lingkungan yang baik ditandai dengan adanya standar kompetensi, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta komitmen pimpinan terhadap pengelolaan risiko keuangan.

2. Penilaian resiko

Proses mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Proses ini penting agar pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati dan strategis.

3. Kegiatan pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatasi risiko dan memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Informasi dan komunikasi

Penyampaian informasi yang relevan dan tepat waktu agar setiap tindakan korektif dapat segera dilakukan. Komunikasi yang baik menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

5. Pemantauan pengendalian intern

Proses menilai efektivitas sistem pengendalian internal melalui evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. *Stakeholder Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Menurut Freeman (1984), organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal (*shareholders*), tetapi juga kepada semua pihak yang terlibat (*stakeholders*). Menurut Ghozali, dkk. (2007):

“Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain)”.

Kaitan teori pemangku kepentingan dengan penelitian ini adalah teori pemangku kepentingan akan mendorong perusahaan atau organisasi dalam menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingannya dengan cara memberikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas kepada para pemangku kepentingan.

2.6.2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP RI No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini bisa menjadi acuan organisasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terbentuk dari terpenuhi atau tidaknya standar akuntansi yang digunakan. Tanpa standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan buruk dan hasil informasi laporan keuangan tidak bisa dibandingkan serta tidak dapat dipahami.

Dalam konteks teori *stakeholder*, standar akuntansi pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jika suatu laporan keuangan tidak memenuhi standar, maka laporan keuangan tersebut tidak bisa dipublikasikan dan diberikan kepada *stakeholder* untuk dibaca dan dijadikan informasi. Organisasi harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerahnya sesuai standar yang sudah ada atau yang diterapkan di Indonesia agar bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga laporan keuangan tersebut bisa dipublikasikan dan menjadi informasi yang valid bagi para *stakeholder*.

2.6.3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun, dkk. (2013), sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah metode dan prosedur penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan di suatu pemerintah daerah. Sistem informasi akuntansi daerah merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah akan menjadi panduan bagi organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Berdasarkan teori *stakeholder*, maka organisasi wajib menerapkan sistem informasi akuntansi daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerahnya sehingga mengurangi terjadinya kesalahan pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah bisa tercapai.

2.6.4. Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2007), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai. Pengendalian internal juga merupakan faktor penting dalam mencapai sesuatu hal yang terbaik seperti kualitas laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian internal terhadap penyusunan laporan keuangan akan mengurangi kemungkinan

kesalahan pencatatan sehingga laporan keuangan tersebut bisa dikatakan andal dan berkualitas.

Berdasarkan teori *stakeholder*, organisasi wajib menerapkan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pengendalian internal berperan penting dalam mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan, meningkatkan keandalan, dan memastikan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, laporan keuangan dapat disajikan secara akurat, transparan, dan akuntabel sehingga memberikan keyakinan pada *stakeholder* bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Indrawan dan Dewi (2022), dengan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDes Se-Kabupaten Jembrana”. Penelitian ini menggunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Jembrana sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rohmah, dkk. (2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan pegawai Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah di BPKAD Kota Malang sebagai subjek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sari (2016), dengan judul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo)”. Penelitian ini menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bungo sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, pemahaman akuntansi berpengaruh negatif, dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Indrawan & Dewi (2022)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDES Se-Kabupaten Jembrana Variabel Independen (X): Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Internal	BUMDES Se-Kabupaten Jembrana.	1. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Pengendalian internal berpengaruh positif

				terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Rohmah, dkk. (2020)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Malang Variabel Independen (X): Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal	BPKAD di Kota Malang	1. Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Sari, (2016)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen (X): Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal	SKPD di Kabupaten Bungo	1. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Pemahaman Akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 5. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mahsun, dkk. (2013) Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini bisa menjadi acuan organisasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terbentuk dari terpenuhi atau tidaknya standar akuntansi yang digunakan. Tanpa standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan buruk dan hasil informasi laporan keuangan tidak bisa dibandingkan serta tidak dapat dipahami.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Dewi (2022), yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmah, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_{A1} = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.8.2. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun, dkk. (2013), sistem informasi akuntansi daerah adalah metode dan prosedur penyelenggaraan keuangan daerah yang ditetapkan di suatu pemerintahan daerah. Sistem informasi akuntansi daerah merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Dengan adanya sistem informasi akuntansi daerah akan menjadi panduan bagi organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Dewi (2022), yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmah, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_{A2} = Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah berpengaruh positif dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.8.3. Pengaruh Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2007), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, pengendalian internal juga merupakan salah satu faktor yang penting. Pengendalian internal bertujuan untuk

meminimalisir kesalahan pencatatan yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teori ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Dewi (2022), dan Rohmah, dkk. (2020).

H_{A3} = Pengendalian Internal berpengaruh positif dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

